

---

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM  
MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN PERIODE 2012-2017**

**Meilizar, Dr Effendi Hasan, M.A.**  
**(meilizar14@gmail.com,effendi23111@yahoo.com)**

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

**ABSTRAK**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal mengurangi angka kemiskinan sudah maksimal. Namun dalam hal pelaksanaan belum sepenuhnya memihak pada masyarakat, terutama masyarakat miskin, hal ini mengakibatkan angka kemiskinan kembali meningkat setelah tahun sebelumnya kemiskinan di Aceh Barat sempat menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mengurangi Angka Kemiskinan pada periode 2012-2017, Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam serta mengetahui dampak kebijakan pemerintah bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan kepustakaan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan. Data dari penelitian lapangan juga diperoleh dari dokumen-dokumen penting dari Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam. Sedangkan penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah membuat kebijakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang inklusif dan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pengentasan kemiskinan yaitu membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan membuat berbagai program yang pro masyarakat miskin yang kemudian direalisasikan melalui SKPD terkait dalam hal ini yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Syariat Islam. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengurangi angka kemiskinan sudah dapat menurunkan angka kemiskinan yang sebelumnya relatif besar yaitu 23,81 persen menjadi 22,76 persen ditahun pertama pemerintahan periode 2012-2017. Pada tahun kedua (2013), angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 23,70 persen. Hal ini dikarenakan oleh pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya

memihak pada masyarakat miskin, Observasi dan pendataan masyarakat miskin yang di lakukan pemerintah belum maksimal, kurangnya pengawasan, kurangnya penyuluhan terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan, keterbukaan informasi publik yang masih jauh dari kata maksimal. Sehingga belum berdampak maksimal terutama terhadap masyarakat miskin di Aceh Barat.

**Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Implementasi Kebijakan, Dampak Terhadap Masyarakat**

### **ABSTRACT**

Aceh Barat District Government policy in terms of reducing poverty rate is maximal. However, in terms of implementation has not been fully sided with the community, especially the poor, this resulted in poverty rates again increased after the previous year poverty in West Aceh had decreased. This study aims to analyze the policy of Aceh Barat District Government in Reducing Poverty Rate in the period 2012-2017 and know the impact government policy for the poor in Aceh Barat District. The data required in this research is obtained from the results of field research and literature. Field research was conducted through interviews with informants. Data from fieldwork are also obtained from important documents from the Regional Secretariat, the Social Service and the Office of the Islamic Sharia. While literature research is obtained by reading textbooks, legislation, journals, and other reading materials related to this research. The results show that the Aceh Barat District Government has made policy through inclusive community empowerment and development programs and one of the efforts of Aceh Barat district government in poverty eradication is to form a coordinating team of poverty alleviation by making pro-poor programs which are then realized through SKPD related in this case is the Regional Secretariat, Social Service, and the Office of Islamic Sharia. The Aceh Barat District Government's policy of reducing poverty rates has been able to reduce the previously relatively high poverty rate of 23.81 percent to 22.76 percent in the first year of the period 2012-2017. In the second year (2013), the poverty rate again increased to 23.70 percent. This is due to the implementation of policies that have not been fully in favor of the poor, the observation and data collection of the poor by the government is not maximal, lack of supervision, lack of education related to poverty reduction policy, public information disclosure which is still far from maximal word. So it has not affected maximally especially to poor people in Aceh Barat.

**Keywords: Government Policy, Policy Implementation, Impact on Society**

## PENDAHULUAN

Salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah menentukan arah kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus menerus, yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik sosial dan budaya. Untuk itu perlu dimaksimalkan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan modal dengan mempertimbangkan keseimbangan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Perencanaan pembangunan merupakan upaya merubah keadaan melalui pola pikir dan ide untuk membangun kemampuan masyarakat (*Capacity of society*), sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah untuk mengurangi peningkatan angkakemiskinan.

Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terdiri dari 12 kecamatan dan termasuk daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) yang setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2010 anggaran belanja Aceh Barat sebesar Rp. 443.400.000.000 dan tahun 2011 naik 17,5 persen menjadi Rp. 521.367.721.331 sedangkan pada tahun 2012 meningkat lagi sebesar 14,5 persen yaitu Rp.597.485.037.884 Anggaran tersebut kemudian meningkat lagi sebesar 25,63 persen menjadi Rp. 692.916.872.284 pada 2013. Namun meningkatnya APBK Aceh Barat sangat berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat. Ini disebabkan Prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat miskin (APBK Aceh Barat: 2011-2014)

Pada tahun 2012 hanya ada 3 (tiga) kebijakan pemerintah Aceh Barat untuk menurunkan angka kemiskinan dengan jumlah anggaran Rp. 6.957.098.000,- yaitu; Pertama, melalui Dinas Syariat Islam dengan jumlah dana sebesar Rp. 600.850.000,- dan programnya adalah pelayanan kehidupan beragama yang keluarannya adalah meningkatkan kesejahteraan fakir miskin (APBK Aceh Barat: 2012).

Kedua, melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dana sebesar Rp. 12.875.000 terdapat 2 (dua) program yaitu; pertama, Rp.

9.075.000,- program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang keluarannya merupakan adanya motivasi untuk kemandirian PMKS. Kedua, Rp. 3.800.000,- program pembinaan *eks* penyandang penyakit sosial (*eks* narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) keluarannya adalah terlaksananya *assesment* dan bimbingan bagi Gepeng (APBK Aceh Barat: 2012).

Ketiga, melalui Sekretariat Daerah dengan dana sebesar Rp. 94.223.000,- Programnya adalah pembinaan *eks* penyandang penyakit sosial (*eks* narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) keluarannya adalah terbantunya fakir miskin dan pemberdayaannya dan program distribusi pangan masyarakat miskin yang keluarannya merupakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin (APBK Aceh Barat: 2012).

Tahun 2013 terdapat program pemerintah yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2013 dengan jumlah anggaran Rp. 972.876.600,-. Melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 3 (tiga) program yaitu; Pertama, program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan dana Rp. 12. 729.000,-. Kedua, program pelayanan dan rehabilitas sosial, program pembinaan anak terlantar, program perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan, program pembinaan *eks* penyandang penyakit sosial (*eks* narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan dana sebesar Rp. 6.295.000,- dan ketiga adalah program keluarga harapan dengan jumlah anggaran Rp. 125.000.000 (APBK Aceh Barat: 2013).

Pada Sekretariat Daerah terdapat 2 (dua) program yaitu; Pertama, program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, program distribusi pangan masyarakat miskin dengan jumlah anggaran sebesar Rp.105.000.000,-. Kedua, program distribusi pangan masyarakat miskin Rp. 736.581.600,- (Bappeda Aceh Barat: 2013).

Pada pemerintahan periode 2009-2011, persentase kemiskinan di Aceh Barat mengalami penurunan di setiap tahunnya yaitu, tahun 2009 angka kemiskinan mencapai 27,09 persen, turun menjadi 24,43 persen pada tahun 2010 dan sejumlah 23,81 persen pada tahun 2011 atau yang keempat tertinggi di Aceh. Pada pemerintahan periode 2012-2017 kembali terjadi peningkatan kemiskinan yang mencapai 23,70 persen pada tahun

2013. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2012) yang jumlahnya adalah 22,76 persen (BPS Aceh Barat: 2009-2013).

Meningkatnya jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dari tahun 2012-2014 tidak mampu mengurangi angka kemiskinan di Aceh Barat. Dikarenakan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah yaitu melalui program-program masih sangat sedikit dan tidak mengarah langsung kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Aceh Barat dan juga masih terdapat program yang tumpang tindih sehingga kebijakan yang telah dilakukan pemerintah belum berdampak pada masyarakat miskin akibatnya angka kemiskinan semakin meningkat.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2013 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat menempatkan Kabupaten Aceh Barat sebagai kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh, di mana 23,70 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Aceh Barat adalah penduduk miskin yang tersebar di daerah pedesaan sebesar 43 persen dan penduduk miskin perkotaan 20 persen. (Radio Republik Indonesia: 2014).

Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Korupsi (LSM GERAK) Aceh Barat Baharuddin Bahari menyatakan bahwa “meningkatnya angka kemiskinan kabupaten Aceh Barat tersebut terjadi akibat kebijakan anggaran dan pembangunan Pemkab Aceh Barat yang belum berpihak rakyat miskin. Padahal alokasi penerimaan dan belanja APBK Aceh Barat terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun” (Radio Republik Indonesia: 2014).

Berdasarkan keterangan di atas maka menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Periode 2012-2017 dalam Mengurangi Angka Kemiskinan”.

---

## TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kemiskinan, teori kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan sebagai acuan dasar.

### 1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya dapat didefinisikan secara sederhana maupun dalam arti luas. Dalam pengertian yang sederhana kemiskinan dapat diterangkan sebagai kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu dalam arti yang lebih luas kemiskinan dapat meliputi ketidakcukupan yang lain seperti; rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja dan berusaha, keterbatasan akses terhadap berbagai hal, dan lain-lain (Asiah Hamzah, 2012: 49)

Dimensi kemiskinan, secara dinamis mengalami perubahan dengan mempertimbangkan aspek nonekonomi masyarakat miskin. Dalam Jurnalnya Asiah Hamzah (2012: 49) terdapat sembilan dimensi kemiskinan yang perlu dipertimbangkan, yaitu;

- 1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (papan, sandang, dan perumahan);
- 2) aksesibilitas ekonomi yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi);
- 3) lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital;
- 4) rentan terhadap guncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun massal;
- 5) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya alam;
- 6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 7) terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan;

---

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengurangi Angka 720 Kemiskinan Periode 2012-2017

(Suatu Penelitian Di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dan Dinas Syari'at Islam)

(Meilizar, Dr Effendi Hasan, M.A.)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018

- 8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; dan
- 9) mengalami ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks, tidak hanya sekedar masalah kekurangan ekonomi tetapi juga mencakup hak-hak dasar dan juga kesenjangan sosial, budaya, politik juga ideologi. Subtansi dari kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, masalah sosial yang berkaitan dengan keadilan, dengan kata lain adanya perbedaan antara seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan yang lebih baik (Todaro, 2003: 219)

## 2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan masyarakat (*public interest*). Kepentingan masyarakat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (*demands*) dari rakyat (Soenarko, 2003: 43).

Dalam teorinya Thomas Dye kebijakan publik merupakan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini mengandung makna yaitu suatu kebijakan publik di buat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah (Subarsono, 2006: 2).

Mengenai kebijakan publik, juga dikemukakan oleh Riant Nugroho yang membagi pengertian kebijakan publik dalam 3 (tiga) pengertian yaitu; Pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara, atau administratur publik. Kedua, kebijakan publik

---

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengurangi Angka 720 Kemiskinan Periode 2012-2017

(Suatu Penelitian Di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dan Dinas Syari'at Islam)

(Meilizar, Dr Effendi Hasan, M.A.)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018

adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan perorangan atau suatu golongan. Ketiga, dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya (Riant Nugroho, 2006: 23).

### **3. Teori Implementasi Kebijakan**

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah peneliti juga menggunakan teori implementasi kebijakan, untuk mengetahui penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh Barat dalam mengurangi kemiskinan. Peneliti mengambil teori implementasi kebijakan menurut Budi Winarno (2002) dan Riant Nugroho (2006) untuk menelaah kebijakan Pemerintah Aceh Barat dalam mengentaskan kemiskinan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasi agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:101).

Menurut Riant Nugroho (2006: 119) implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak di jumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Untuk memahami implementasi



kebijakan yang efektif perlu dipahami berbagai metode implementasi kebijakan.

Salah satu model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh DeLeon dan DeLeon. Pertama, model implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Kebijakan disini mempunyai ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Kedua, implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena walaupun ambiguitasnya rendah, namun tingkat konfliknya tinggi. Ketiga, implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Keempat, implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi (Riant Nugroho, 2006: 125).

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Tujuan utama penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada rincinya menjadi variabel-variabel terkait (Nurul, 2009: 92).

Agar memperoleh data secara akurat dan mendalam serta mendapatkan gambaran yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang terkait, gambar, dan data resmi lainnya. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti persentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen, dan rekaman-rekaman resmi lainnya (Emzir, 2012: 3).

---

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengurangi Angka 720 Kemiskinan Periode 2012-2017

(Suatu Penelitian Di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dan Dinas Syari'at Islam)

(Meilizar, Dr Effendi Hasan, M.A.)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018

Informan-Informan adalah orang yang dimintakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Penentuan informan dilakukan secara purposively, yaitu informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya, di samping informan yang dijadikan subjek penelitian dapat dipertanggung jawabkan (Bungin, 2011: 88). Informan penelitian menurut Muhammad Idrus (2009: 91) merupakan individu, benda, atau organisme yang yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun yang menjadi informan di dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bupati Aceh Barat
- 2) Wakil Bupati Aceh Barat
- 3) Kepala Bappeda
- 4) Kepala Biro Kesra
- 5) Kabid Pemerintahan dan Sosial
- 6) Anggota DPRK Aceh Barat
- 7) Kepala Dinas Sosial Aceh Barat
- 8) Akademisi
- 9) Masyarakat miskin

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Uraian lebih lanjut kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya. Sumber data primer dalam penelitian sosial dapat dilihat sebagai data yang yang merupakan perilaku sosial dari masyarakat. Data dalam skripsi ini diperoleh

dari dokumen, dan wawancara. Dokumen diskripsi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa dokumen dari suatu peristiwa, maupun karya-karya yang bersumber dari peristiwa sosial tertentu. Sumber data ini diperoleh dari lapangan dimana penelitian ini akan dilaksanakan untuk memperoleh data ini digunakan metode wawancara informan yang terkait (Nurul 2009: 201).

2) Data skunder

Data skunder yaitu data yang akan didapat melalui buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, arsip dinas terkait, thesis, internet dan dari sumber yang berkaitan lainnya yang berkaitan dengan masalah atau materi pada suatu penelitian (Nurul 2009: 210)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **A. Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Mengambil Kebijakan dalam Pengentasan Kemiskinan**

Kebijakan Pemerintah Aceh Barat menjadi hal yang sangat penting terkait dengan penanggulangan kemiskinan, dikarenakan apabila kebijakan yang dilahirkan tepat sasaran maka akan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Aceh Barat harus sesuai dengan visi dan misi yang telah ada. Sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai yaitu pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Upaya ini ditempuh oleh pemerintah Aceh Barat melalui Keputusan Bupati Aceh Barat No. 275 Tahun 2015 Tentang pembentukan Panitia Pelaksanan Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dimaksudkan untuk menjalankan fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan langkah-langkah konkrit dalam mengkoordinasikan

---

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengurangi Angka 720 Kemiskinan Periode 2012-2017

(Suatu Penelitian Di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dan Dinas Syari'at Islam)

(Meilizar, Dr Effendi Hasan, M.A.)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018

seluruh program penanggulangan kemiskinan yang kemudian programnya dilaksanakan lintas sektor.

Percepatan penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh barat yaitu sebesar 17,23% pada tahun 2017, hal ini diperlukan langkah strategis daerah terhadap penanganan program dan kegiatan yang sistemik, terpadu, dan terintegrasi melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat selama ini juga melakukan inovasi dalam pengentasan kemiskinan seperti membangun rumah sangat sederhana (RSS), membayar tunggangan listrik kaum dhuafa, menciptakan sekolah informal dan pelatihan skill yang terakreditasi untuk remaja tingkat SMP, SMA (putus sekolah) dan perguruan tinggi (putus belajar), revitalisasi posyandu dan koperasi, pemberdayaan ekonomi lokal melalui CSR, dan sebagainya.

Melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Aceh Barat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui melalui beberapa program andalan seperti:

- 1) Kelompok Usaha Bersama KUBE
- 2) Rehab Rumah dan Usaha Ekonomi Produktif
- 3) Latih Pencari Kerja
- 4) Magang ke Jepang
- 5) Kegiatan Padat Karya
- 6) Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Melalui Dinas Syariat Islam programnya adalah pelayanan kehidupan beragama yang keluarannya adalah meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan terkait dengan

---

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengurangi Angka 720 Kemiskinan Periode 2012-2017

(Suatu Penelitian Di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dan Dinas Syari'at Islam)

(Meilizar, Dr Effendi Hasan, M.A.)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018

kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Periode 2012-2017.

1. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan membuat kebijakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang inklusif serta membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan membuat berbagai program yang pro masyarakat miskin yang kemudian direalisasikan melalui SKPD terkait dalam hal ini yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Syariat Islam.
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengurangi angka kemiskinan sudah dapat menurunkan angka kemiskinan yang sebelumnya relatif besar yaitu 23,81 persen menjadi 22,76 persen ditahun pertama kepemerintahan periode 2012-2017. Pada tahun kedua (2013), angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 23,70 persen.
3. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan yaitu pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya memihak pada masyarakat miskin, observasi dan pendataan masyarakat miskin yang di lakukan pemerintah belum maksimal, kurangnya pengawasan, kurangnya penyuluhan terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan, keterbukaan informasi publik yang masih jauh dari kata maksimal. Sehingga belum berdampak maksimal terutama terhadap masyarakat miskin di Aceh Barat.

### Saran

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mengurangi angka kemiskinan masih terdapat beberapa kekurangan salah satu diantaranya yaitu pelaksanaan pelaksanaan

---

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengurangi Angka 720 Kemiskinan Periode 2012-2017

(Suatu Penelitian Di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dan Dinas Syari'at Islam)

(Meilizar, Dr Effendi Hasan, M.A.)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018

kebijakan melalui program-program yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat miskin. Adapun saran penulis terkait penanggulangan kemiskinan yang terjadi di lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga yang berwenang, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus konsisten dengan kebijakan yang telah dikeluarkan serta dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan harus lebih memihak kepada masyarakat miskin.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan, observasi dan pendataan masyarakat miskin yang di lakukan harus lebih tepat sasaran guna percepatan penanggulangan berjalan efektif.
3. Pengawasan pelaksanaan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah juga harus lebih terbuka terkait dengan informasi publik terutama kebijakan yang belum dilakukan atau yang sedang dilakukan maupun yang sudah di lakukan oleh pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Presindo.
- Burhan Bungin. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2013. *Metodelogi penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Drs. Hesel Nogi S dan Tangkilisan, M.Si. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

---

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengurangi Angka 720 Kemiskinan Periode 2012-2017

(Suatu Penelitian Di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dan Dinas Syari'at Islam)

(Meilizar, Dr Effendi Hasan, M.A.)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018

- H. Soenarko. 2003. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Idrus. 2009. *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta. Erlangga.
- Nurul Zuriah. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Askara.
- Prof. Drs. HAW. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ramlan Subarki. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Kosep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Saefuddin,dkk. 2003. *Menanggulangi Kemiskinan penduduk*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

#### **B. Skripsi/ Tesis**

- Andy Alvian Indratama. 2013. Kajian Yuridis Terhadap Pemerintah Kota Semarang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Tibyan. 2010. Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **C. Jurnal**

---

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengurangi Angka 720 Kemiskinan Periode 2012-2017

(Suatu Penelitian Di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dan Dinas Syari'at Islam)

(Meilizar, Dr Effendi Hasan, M.A.)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018

Asna Aneta. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1. FISIP. Universitas Gorontalo.

Asiah Hamzah. 2012. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Kelaparan Di Indonesia: Realita Dan Pembelajaran. *Jurnal AKK*. Volume 1 No.1. Bagian Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas.

Darwin, Effendi. 2018. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3, Nomor 2: 211-228. Maret 2018. Kepemimpinan Geuchik Dalam Meningkatkan Pembangunan Gampong Alue Krueng Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.(Studi kepemimpinan geuchik Miswar dalam pengelolaan dana gampong)

Haedar Akib. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1, No. 1: 1-11. FISIP Universitas Negeri Makassar.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

*Perpres Nomor 15 Tahun 2010* tentang percepatan penanggulangan kemiskinan

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003* tentang asas keadilan dan kepatutan.

*Undan -Undang Nomor 12 Tahun 2008* tentang Pemerintahan Daerah

*Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2012* Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013.

*Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2013* Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013.

---

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengurangi Angka 720 Kemiskinan Periode 2012-2017

(Suatu Penelitian Di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dan Dinas Syari'at Islam)

(Meilizar, Dr Effendi Hasan, M.A.)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018



**E. Internet**

Asna Aneta. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan*

*Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo.* <http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/4/universitas%20negeri%20makassar-digilib-unm-asnaaneta-173-1-asnaane-a.pdf> (diakses 15/1/2015)

GeRAK Aceh Barat. 2014. *APBK Aceh Barat Meningkatkan Angka kKemiskinan Naik.*

[http://rri.co.id/post/berita/113722/ekonomi/apbk\\_aceh\\_barat\\_meningkat\\_angka\\_kemiskinan\\_naik.html](http://rri.co.id/post/berita/113722/ekonomi/apbk_aceh_barat_meningkat_angka_kemiskinan_naik.html) (diakses tanggal 6 Mei 2015).

Zamhuri. 2014. *Tuntaskan Kemiskinan di Aceh Barat.* <http://diliputnews.com/read/27866/tuntaskan-kemiskinan-di-aceh-barat.html> (diakses 22/12/2014).

---

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengurangi Angka 720 Kemiskinan Periode 2012-2017

(Suatu Penelitian Di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dan Dinas Syari'at Islam)

(Meilizar, Dr Effendi Hasan, M.A.)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018